

**IDENTIFIKASI *PREFERENSI* MASYARAKAT DALAM  
SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERMUKIMAN  
(Studi Kasus: Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon)**

TUGAS AKHIR

Oleh:

**TAUFIK HIDAYAT**

**L2D 098 468**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2005**

## ABSTRAK

Urbanisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari atau dihentikan. Hal tersebut terjadi karena manusia selalu berkembang, baik secara fisik maupun nonfisik. Perkembangan fisik misalnya semakin tinggi tingkat kebutuhan sarana dan prasarana, sedangkan perkembangan nonfisik misalnya tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Permukiman yang cukup padat pada suatu kota, tentunya dapat menimbun sampah yang cukup banyak pula. Pengelolaan sampah atau limbah padat pada dasarnya dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem **on-site** dan **off-site** (Istiawan, 1996). Sistem **on-site** yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing-masing sumber dan umumnya pada lokasi masing-masing sumber, baik dengan cara dibakar, ditimbun, didaur-ulang, dll. Sistem **off-site** yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh sumber pada lokasi tertentu dan mempunyai jarak yang cukup jauh. Proses pengelolaan persampahan **off-site** perkotaan pada umumnya dilakukan melalui lima tahap, yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. **Pewadahan**, yaitu tempat bagi timbulan sampah yang dikumpulkan pada suatu alat keranjang, seperti kantong plastik, bin/tong, atau kontainer. **Pengumpulan**, yaitu proses pemungutan timbulan sampah dari sumber sampah dengan menggunakan alat bantu, yaitu gerobak sampah, atau becak. **Pemindahan**, yaitu proses pengangkutan timbulan sampah dari sumber sampah ke stasiun transfer/transer depo atau lebih dikenal sebagai TPS. **Pengangkutan**, yaitu proses pemindahan timbulan sampah dari TPS ke TPA dengan menggunakan alat angkut truk, baik truk biasa, Dump truck, Compactor truck maupun Armroll truck. **Pembuangan akhir**, yaitu area lahan bagi tempat pembuangan akhir sampah komunal yang diproses baik secara landfills, incineration, recycling atau storage. Rata-rata produksi sampah kota Cirebon pada tahun 2003/2004 produksi sampah per hari mencapai 600-750 meter kubik, bila dibandingkan tahun 2002/2003 produksi sampah tersebut naik sekitar 20%. Hal ini diakibatkan bukan saja karena pertumbuhan penduduk tetapi juga disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Pemkot Cirebon memang telah menyadari akan hal ini, dengan mengeluarkan ketentuan RPPK-PL (Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan serta Penyehatan Lingkungan) bagi setiap perumahan untuk membiayai pengelolaan persampahan di Kota Cirebon (Mitra Dialog (MD), 14 November 2003). Ketentuan ini mewajibkan masyarakat membayar RPPK-PL yang bervariasi melalui rekening air bersih (PDAM). Sutrisna (sekda), dalam MD menyatakan bahwa retribusi tersebut dikenakan atas biaya operasional persampahan dari TPS ke TPA Kopi Luhur, sedangkan hasil pantauan MD (2003) disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak bersedia membayar RPPK-PL tersebut dengan alasan sudah membayar iuran sampah di tingkat RT/RW masing-masing. Oleh karena itu, studi ini akan mengidentifikasi peningkatan sistem pengelolaan persampahan permukiman berdasarkan preferensi masyarakatnya di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran, seperti: mengidentifikasi karakteristik penduduk dan pengelolaan sampah permukiman, mengidentifikasi peningkatan pengelolaan sampah kota dan lingkungan berdasarkan preferensi masyarakatnya, baik dari segi kelembagaan, teknis operasional maupun pembiayaan, serta mengidentifikasi peningkatan sistem pengelolaan persampahan permukiman berdasarkan preferensi masyarakat di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Jadi diharapkan dapat memberikan saran bagi pertimbangan peningkatan sistem pengelolaan persampahan permukiman berdasarkan preferensi masyarakatnya di Kota Cirebon pada umumnya dan di Kecamatan Harjamukti pada khususnya.

Pendekatan studi secara umum adalah dengan metode Real Demand Survey. Metode ini adalah metode yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakatnya. Proses yang dilakukan adalah dengan cara wawancara baik langsung maupun tidak langsung terhadap responden-responden yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan studi ini. Mengingat luasnya wilayah studi dan banyaknya unit-unit studi yang dijadikan sebagai objek, maka responden dapat dipilih berdasarkan pada teori sampling. Teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah responden atau sampel adalah teknik proporsional cluster sampel. Populasi yang ada dibagi menjadi beberapa area, dan sampel diambil dari setiap area, maka banyaknya sampel yang diambil untuk setiap area didasarkan atas proporsi area tersebut dalam populasinya, sehingga sampel tersebut proporsional atas area yang ada (Nazir, 1988). Sampel ini didasarkan oleh jumlah kepala keluarga yang ada di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sehingga seluruh jumlah sampel adalah  $17+20+26+19+17 = 99$  sampel, akan tetapi untuk lebih reliabel dan valid maka sampel menjadi 132 responden. Metode lain yang digunakan adalah contingent valuation method. Metode ini digunakan untuk menilai rasa/nilai/norma manusia yang ditanyakan bagi kemauan membayar (**willingness-to-pay**) mereka atau disebut juga skenario hipotetis. Adapun persamaan bagi kemauan membayar (**willingness to pay**):

$$WTP_{r,i \text{ (yes)}} = \alpha + \beta \text{biaya retribusi/iuran sampah} + \gamma \text{jenis permukiman} + \delta \text{jenis penghasilan} + \epsilon \text{pendapatan} \\ + \zeta \text{penghasilan} + \eta \text{konsumsi} + \theta \text{jumlah anggota keluarga}$$

Metode ini juga elastisitas dengan kemampuan membayar (**ability-to-pay**) masyarakat akan layanan prasarana perkotaan. Sedangkan untuk mengukur kemampuan membayar (*ability to pay*) persamaannya:

$$ATP_{r,i \text{ (yes)}} = \alpha + \beta \text{biaya retribusi/iuran sampah} + \gamma \text{jenis permukiman} + \delta \text{jenis penghasilan} \\ + \epsilon \text{pajak bumi dan bangunan} + \zeta \text{kendaraan} + \eta \text{luas lahan} + \theta \text{jumlah tanggungan anggota keluarga}$$

Sehingga didapat kemungkinan (probabilitas) membayar retribusi dan iuran sampah bagi peningkatan sistem pengelolaan persampahan permukiman, baik di lingkungan permukiman maupun di lingkungan kota.

Hasil tabulasi yang dilakukan adalah masyarakat di lingkungan Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon mempunyai karakteristik kependudukan yaitu jumlah anggota keluarga dan tanggungan anggota keluarga di lingkungan permukiman tak-terencana cenderung lebih banyak dibandingkan di lingkungan permukiman terencana, dan dengan tingkat pendidikan yang cenderung lebih rendah. Karakteristik perekonomian di Kecamatan Harjamukti yaitu tingkat penghasilan, tingkat pendapatan dan rata-rata konsumsi atas bahan makanan di lingkungan permukiman tak-terencana cenderung lebih rendah dibandingkan di lingkungan permukiman terencana. Karakteristik kekayaan di Kecamatan Harjamukti yaitu jumlah kendaraan di lingkungan permukiman tak-terencana cenderung lebih sedikit dibandingkan di lingkungan permukiman terencana serta dengan luas lahan dan nilai PBB yang cenderung lebih kecil dan atau rendah; sedangkan karakteristik pengelolaan jaringan air bersih dan jaringan persampahan permukiman di Kecamatan Harjamukti adalah relatif lebih banyak kepala keluarga yang memiliki jaringan air bersih (75,76%) dan jaringan persampahan permukiman (81,82%) dibandingkan dengan kepala keluarga yang tidak memiliki jaringan air bersih (24,24%) dan yang tidak memiliki jaringan persampahan permukiman (18,18%), dan dengan cara membuat sumur (34,38%) bagi yang tidak memiliki jaringan air bersih (PDAM) yaitu di permukiman tak-terencana bawah (50,00%) dan menengah (50,00%), serta terencana menengah (25,00%); sedangkan kepala keluarga tidak memiliki jaringan persampahan permukiman umumnya masyarakat membakar sampahnya (58,33%), yaitu 90,00% tak-terencana menengah, 1,67% terencana menengah, dan 5,00% di permukiman terencana atas.

Hasil tabulasi tersebut juga didapat kesimpulan bahwa untuk peningkatan sistem pengelolaan sampah kota akan lebih baik jika biaya retribusi sampah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat melalui rekening PDAM, dan jika pemerintah kota meninjau ulang letak/lokasi TPS, dan atau meningkatkan ritasi pengangkutan dan pemeliharaan TPS untuk lingkungan permukiman yang memiliki jaringan persampahan; sedangkan untuk permukiman yang tidak memiliki jaringan persampahan agar lebih diperhatikan mengenai lokasi/jarak TPA dengan permukiman terdekat serta biaya retribusi sampah yang tidak perlu lagi dinaikkan (62,87%) karena biaya bulanan yang sudah membebani mereka. Apabila ditingkatkan, itupun hanya permukiman terencana menengah yang berkisar Rp 3.000/bulan karena daya beli masyarakat tersebut cukup tinggi (1,282785230). Peningkatan sistem pengelolaan sampah lingkungan akan lebih baik jika biaya iuran sampah ditentukan melalui rapat RT dan dikelola dari warga ke bendahara RT, dan jika aparat RT/RW meninjau ulang mengenai pemindahan/pengangkutan oleh tukang sampah dengan upah Rp 200.000/bulan agar lebih teratur dan rutin dalam masa kerjanya serta biaya iuran sampah yang tidak perlu lagi dinaikkan (57,57%) karena biaya bulanan yang sudah membebani mereka. Apabila ditingkatkan, itupun hanya permukiman terencana menengah yang berkisar Rp 5.000/bulan karena daya beli masyarakat tersebut cukup tinggi (4,816459122). Jadi peningkatan sistem pengelolaan sampah permukiman perkotaan di Kecamatan Harjamukti, sebaiknya lebih pada pemeliharaan, pembangunan dan peninjauan ulang lokasi TPS, dan atau lokasi permukiman di sekitar TPA serta biaya retribusi sampah yang disesuaikan lagi melalui rekening PDAM untuk pengelolaan sampah kota. Bagi pengelolaan sampah lingkungan sebaiknya lebih pada keteraturan/rutinitas pemindahan (pengangkutan) oleh tukang sampah dengan upah Rp 200.000/bulan serta biaya iuran sampah yang ditentukan melalui rapat RT dan atau dikelola dari warga ke bendahara RT di lingkungan masing-masing permukiman. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kebersihan dan kesehatan, baik di lingkungan kota maupun di lingkungan masing-masing permukiman.

# BAB I PENDAHULUAN

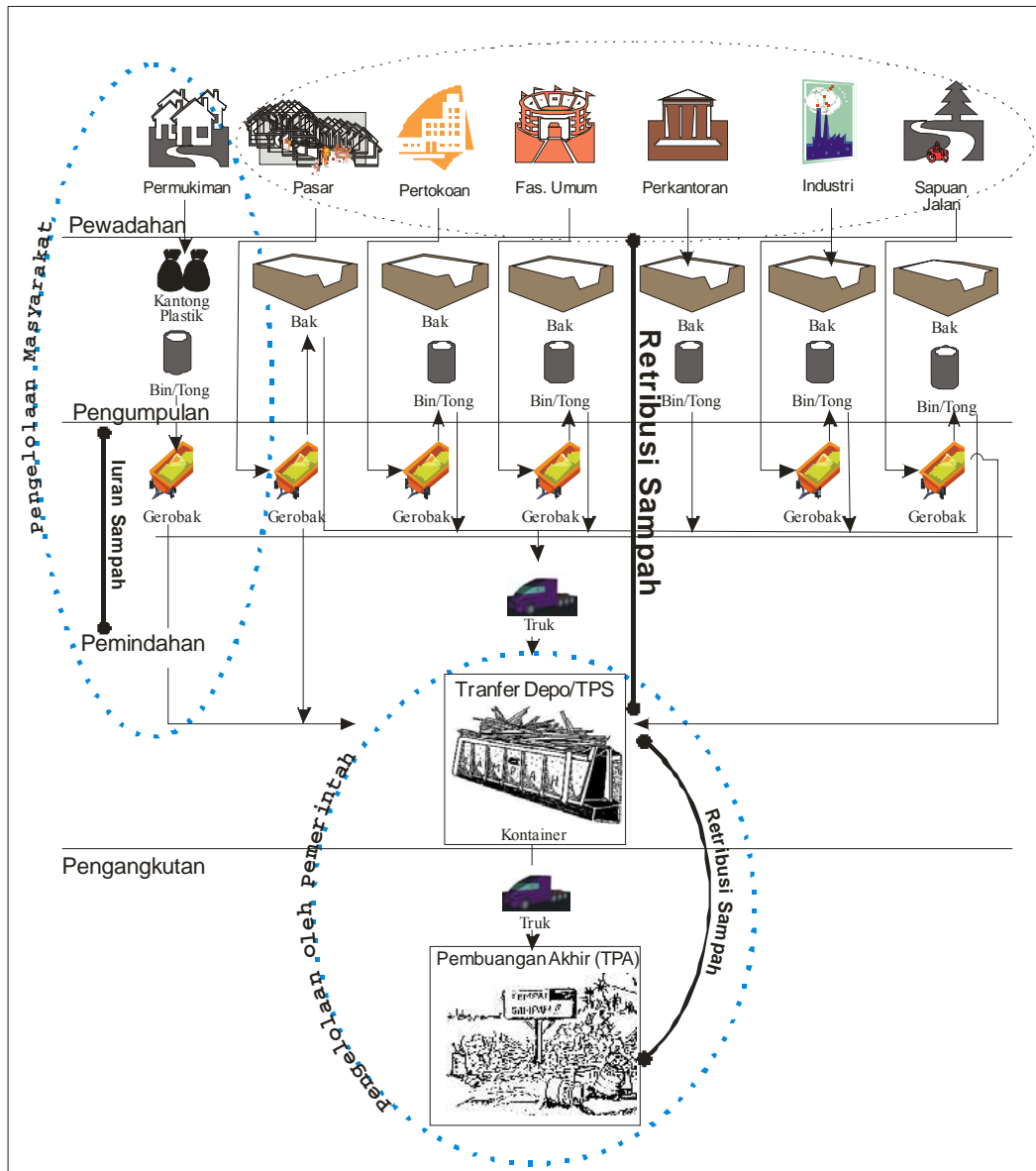
## 1.1 Latar Belakang

Urbanisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari atau dihentikan. Hal tersebut terjadi karena manusia selalu berkembang, baik secara fisik maupun nonfisik. Perkembangan fisik misalnya semakin tingginya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana; sedangkan perkembangan nonfisik misalnya tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Permukiman yang cukup padat pada suatu kota, tentunya dapat menimbun sampah yang cukup banyak pula. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bila tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah atau limbah padat pada dasarnya dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem *on-site* dan *off-site* (Istiawan, 1996). Sistem *on-site* yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing-masing sumber dan umumnya pada lokasi masing-masing sumber, baik dengan cara dibakar, ditimbun, didaur-ulang, dll. Sistem *off-site* yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh sumber pada lokasi tertentu dan mempunyai jarak yang cukup jauh. Menurut Dirjen Cipta Karya 2000, pola pelayanan persampahan secara umum dibagi menjadi dua yaitu pelayanan individual dan pelayanan komunal.

Pelayanan individual adalah pelayanan persampahan yang dilakukan oleh masing-masing individu pada satu wadah tersendiri, sedangkan pelayanan komunal adalah pelayanan persampahan yang dilakukan secara bersama-sama pada satu wadah, misalnya pasar, rumah sakit, dan industri. Sumber-sumber sampah yaitu timbulan sampah yang diakibatkan oleh: permukiman/rumah tangga, pasar, komersial, fasilitas umum, perkantoran, kawasan industri dan sapuan jalan (Istiawan, 1996 dan Pangarso, 2003).

Proses pengelolaan persampahan *off-site* perkotaan pada umumnya dilakukan melalui lima tahap, yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. **Pewadahan**, yaitu tempat bagi timbulan sampah yang dikumpulkan pada suatu alat keranjang, seperti kantong plastik, bin/tong, atau kontainer. **Pengumpulan**, yaitu proses pemungutan timbulan sampah dari sumber sampah dengan menggunakan alat bantu, yaitu gerobak sampah, atau becak. **Pemindahan**, yaitu proses pengangkutan timbulan sampah dari sumber sampah ke stasiun tranfer/tranfer depo atau lebih dikenal sebagai TPS. **Pengangkutan**, yaitu proses pemindahan timbulan sampah dari TPS ke TPA dengan menggunakan alat angkut truk, baik truk biasa, *Dump truck*, *Compactor truck* maupun *Armroll truck*. **Pembuangan akhir**, yaitu area lahan bagi tempat pembuangan akhir sampah komunal yang diproses baik secara *landfills*, *incineration*, *recycling* atau *storage*; untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Diolah dari Istiawan 1996 dan Cipta Karya 2000

**Gambar 1.1**  
**Pengelolaan Persampahan Perkotaan**

Menurut Nurzaman (2002), Kota Cirebon adalah pusat dari Wilayah Pembangunan (WP) VI dalam Propinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Indramayu, Majalengka, Cirebon dan Kuningan dengan PDRB perkapita urutan ke-3 sebesar Rp 3.456.761 pada tahun 1998. Oleh karena itu, sebagai pusat WP ini tentunya terjadi pemusatan penduduk dan kegiatannya. Penduduk dengan kegiatannya akan sangat jelas terlihat dalam memproduksi sampah setiap harinya, untuk Kota Cirebon, pada tahun 2003/2004 produksi sampah per hari mencapai 600-750 meter kubik atau 120-150 ton (Laporan Selayang Pandang Pada Subdin Persampahan, 2004); bila dibandingkan tahun 2002/2003, produksi sampah di Cirebon tersebut naik sekitar 20%. Hal ini diakibatkan bukan saja

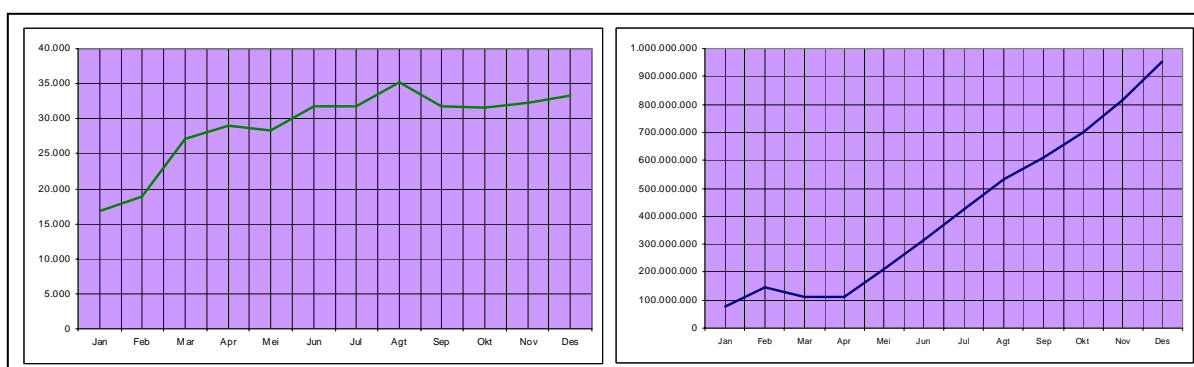
karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah perkapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

**TABEL I.1**  
**JUMLAH PELANGGAN DAN NOMINAL YANG BELUM MEMBAYAR**  
**RERTIBUSI SAMPAH (RPPK/PL) TAHUN 2003 DI KOTA CIREBON**

| BULAN         | BELUM MEMBAYAR |                |                      |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|               | PELANGGAN      | %              | Rp                   | %              |
| Januari       | 16.892         | 0,049          | 78.958.000           | 0,016          |
| Februari      | 18.958         | 0,054          | 146.656.802          | 0,029          |
| Maret         | 27.123         | 0,078          | 110.776.049          | 0,022          |
| April         | 29.081         | 0,083          | 112.112.145          | 0,022          |
| Mei           | 28.390         | 0,082          | 210.200.309          | 0,042          |
| Juni          | 31.801         | 0,091          | 314.156.490          | 0,063          |
| Juli          | 31.740         | 0,091          | 423.150.534          | 0,085          |
| Agustus       | 35.267         | 0,101          | 532.109.559          | 0,106          |
| September     | 31.800         | 0,091          | 608.806.902          | 0,122          |
| Oktober       | 31.575         | 0,091          | 699.256.844          | 0,140          |
| November      | 32.287         | 0,093          | 815.210.118          | 0,163          |
| Desember      | 33.363         | 0,096          | 950.926.195          | 0,190          |
| <b>Jumlah</b> | <b>348.277</b> | <b>100,000</b> | <b>5.002.319.947</b> | <b>100,000</b> |

Sumber: Hasil Observasi di Kantor PDAM, 2004

Pemkot Cirebon memang telah menyadari akan hal ini, dengan mengeluarkan ketentuan RPPK-PL (Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan serta Penyehatan Lingkungan) bagi setiap perumahan untuk membiayai pengelolaan persampahan di Kota Cirebon (Mitra Dialog/MD, 14 November 2003). Ketentuan ini mewajibkan masyarakat membayar RPPK yang bervariasi melalui rekening air bersih (PDAM). Sutrisna (sekda), dalam MD tersebut menyatakan bahwa retribusi tersebut dikenakan atas biaya operasional persampahan dari TPS ke TPA Kopi Luhur, sedangkan hasil pantauan 'MD 2003' disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak bersedia membayar RPPK-PL dengan alasan sudah membayar iuran sampah di tingkat RT/RW masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I.1 di atas.



Sumber: Diolah dari Tabel I.1

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Pelanggan Dan Nominal Yang Tidak Membayar RPPK/PL**  
**atau Retribusi Sampah Tahun 2003 Di Kota Cirebon**